

AKUNTABILITAS KEPALA DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA

(Studi di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada FISIP “Veteran” Jawa Timur



Disusun Oleh :

GITA DIO TAMA YOLANDA  
NPM. 0841010023

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
2012

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul. **AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)** .

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Lukman Arif, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Pada kesempatan ini penunulis mengucapkan terima kasih:

1. Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Lukman Arif, MSi selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
3. Ibu Dra. Susi Hardjati, MAP selaku Sekertaris Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Drs. Pudjo Adi M.Si dan Ibu Dra. Sri Wibawani M.Si selaku penguji proposal dan penguji skripsi yang turut memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal dalam proses perkuliahan di Program Studi Administrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian di Desa Menganti.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi penulis sangat menyadari masih ada kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis maupun materil penyusunannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih atas saran dan kritik.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juni 2012

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAKSI .....	xiii
 BAB I    PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
 BAB II    KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Landasan Teori .....	13
2.2.1. Kebijakan publik .....	13
2.2.1.1. Pengertian kebijakan Publik .....	13
2.2.1.2. Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	16
2.2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.2.1.4. Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	18

2.2.1.5. Kegagalan Implementasi Kebijakan .....	18
2.2.1.6. Pertanggungjawaban APB Desa dalam Sudut Pandang Kebijakan .....	19
2.2.2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Otda) .....	21
2.2.3. Konsep Anggaran dan Pemerintah Daerah di Indonesia .....	22
2.2.3.1. Tahap-tahap Penyusunan Anggaran APB Desa .....	26
2.2.4. Konsep Akuntabilitas .....	29
2.2.4.1. Pengertian Akuntabilitas .....	29
2.2.4.2. Akuntabilitas Kinerja .....	33
2.2.4.3. Jenis Akuntabilitas .....	34
2.2.5 Kerangka berfikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	40
3.2. Lokasi Penelitian/Situs Penelitian .....	41
3.3. Fokus Penelitian .....	42
3.4. Informan dan teknik data .....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.6. Teknik Analisis Data .....	47
3.7. Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum .....	52
4.1.1. Keadaan Geografis Desa Menganti .....	52
4.1.2. Keadaan Monografis Desa Menganti .....	53

4.1.3. Keadaan Demografis Desa Menganti.....	56
4.1.4. Keadaan Administratif Desa Menganti.....	57
4.2. Hasil Penelitian.....	66
4.2.1. Akuntabilitas Vertikal .....	67
4.2.2. Akuntabilitas Horizontal .....	74
4.3. Pembahasan.....	91
4.3.1. Akuntabilitas Vertikal .....	92
4.3.2. Akuntabilitas Horizontal .....	94
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan .....	100
5.2. Saran .....	101
 DAFTAR PUSTAKA	

## ABSTRAKSI

GITA DIO TAMA YOLANDA, 0841010023, AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

Pada Peraturan Daerah (Perda) Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Desa pada Pasal 7 Ayat 1 (a) menjelaskan bahwa proses akuntabilitas yang dilakukan oleh kepala desa harus tertuju pada tiga sasaran yaitu masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dan Bupati. Dari observasi yang ada dilapangan, Kepala Desa hanya mengimplementasikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada BPD dan Bupati, tetapi peneliti belum menemukan laporan pertanggungjawaban secara tertulis yang ditempel pada papan pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat. Sedangkan didalam Perda Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Nomor 7 Pasal 2 disebutkan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan Desa kepada masyarakat harus berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya (misalnya radio komunitas). Maka dari itu peneliti mengambil judul akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran APB Desa ditetapkan pada fokus pertama yaitu akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas Kepala Desa Menganti terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa dalam bentuk laporan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat. Sedangkan fokus kedua yaitu akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada BPD Desa dan masyarakat Desa.

Metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan analisis model interaktif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengabil data dari sumber data yang berupa tulisan, perilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, kata-kata. Dengan peneliti sebagai instrumen penelitian.

Kesimpulan dari hasil penelitian menyatakan bahwa Fokus pertama akuntabilitas Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dilaksanakan setahun sekali diakhir tahun anggaran dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat pada tahun berikutnya. Untuk bentuk laporan kepada Bupati melalui Camat berupa tertulis. Akuntabilitas Horizontal yang meliputi dua sasaran kajian yaitu (a) Akuntabilitas Kepala Desa Kepada BPD melalui musyawarah BPD akuntabilitas Kepala Desa kepada BPD telah dilaksanakan pada akhir Desember 2011 dalam bentuk lisan dan tertulis. (b) Akuntabilitas Kepala Desa Kepada masyarakat akuntabilitas Kepala Desa kepada masyarakat telah dilaksanakan secara lisan pada pada akhir Desember 2011 yang dihadiri tokoh masyarakat dan BPD. Sedangkan laporan tertulis berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman desa tidak dilaksanakan, melainkan kepala desa memberikan draft neraca APB Desa kepada masyarakat melalui Kasun, RW dan RT.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejak awal dibentuknya Negara Kesatuan republik Indonesia oleh para pendiri Negara ini telah menetapkan pilihannya pada prinsip pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah Negara. Dengan demikian, sudah diamanatkan oleh pendiri republik ini adanya daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zauhar : 1994).

Pada dasarnya semua tuntutan tersebut dimaksudkan untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang dianggap lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah dan daerah juga lebih mampu mewujudkan otonomi daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah mulai dilaksanakan secara efektif pada bulan Januari 2001, telah membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah, terdapat beberapa kemajuan berarti terhadap hubungan pusat dan daerah. Kemajuan disini mempunyai artian seperti tingkat partisipasi masyarakat yang semakin luas dalam berbagai bidang, atau tingkat tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih besar kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu dilakukan dan diperbaiki dalam pelaksanaan otonomi daerah.



Hal ini dapat dilihat dalam proses Pembuatan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang sama sekali tidak melibatkan orang daerah dan lebih mengutamakan kepentingan pusat. Disamping itu masih banyak ketidakjelasan dan kurang keterbukaan bagaimana implementasi yang baik itu mesti dimulai (Salam,2005:11). Maka dari itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang dirasa belum mampu menjawab tantangan atau mengakomodasi tuntutan perkembangan masyarakat, dan ketatanegaraan yang ditinjau dari sisi daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Berdasar kondisi tersebut maka pemerintah memperbaiki Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara efektif pada tanggal 15 Oktober 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sarana pemerintah untuk melaksanakan reformasi administrasi di tubuh pemerintah dan bertujuan untuk memperbaiki praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pelaksanaan otonomi daerah yang baik harus didukung oleh semua pihak yang terkait, baik sumber dana (anggaran), sumber daya alam, sumber daya tersebut tidak lantas dibiarkan saja tetapi juga harus dikelola secara maksimal agar dapat menghasilkan sumber dana untuk daerah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang maksimal harus didukung oleh sumber daya manusia (stakeholder) yang ada di daerah. Sebab stakeholder dalam organisasi pemerintah merupakan pelaku dan sebagai penentu keberhasilan tujuan

organisasi tersebut. Sehingga stakeholder merupakan faktor yang penting dalam organisasi.

Pada kenyataannya, stakeholder di daerah masih belum mampu. Hal ini terbukti masih banyaknya berbagai tuntutan dan juga kritikan dari masyarakat yang menuntut adanya pelayanan yang baik. Menurut Islami (1998:3), setidaknya ada lima hal yang menjadi tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi guna menyusun agenda kebijakan reformasi administrasi Negara dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang meliputi :

1. Pemerintah dituntut mampu menumbuhkan good governance dalam rekrutment aparat pemerintah disemua jenjang didasarkan pada merit system.
2. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas rendahnya kualitas pelayanan publik,
3. Semua aparat pemerintah dituntut untuk mempunyai sense of crisis,
4. Aparat pemerintah dituntut agar lebih profesional dalam mengedepankan terpenuhinya public acuntability and responsibility,
5. Masyarakat sebagai pihak yang harus dipenuhi dan dilindungi kepentingannya (public interest), menuntut agar pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi mereka sejauh bisa memenuhinya.

Menurut Dwiyanto, dkk (2003:106), bahwa Transparency International menempatkan Indonesia pada tahun 2002 di urutan ke-98 antara 102 negara. Dalam hal korupsi, hal ini terbukti bahwa masih tingginya tingkat

korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada buku tersebut (126-127) juga menjelaskan bahwa praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tidak mengalami banyak perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, Governance and Decentralization Survey 2002 (GDS 2002) juga membuktikan bahwa praktik KKN masih menjadi fenomena yang mudah dijumpai dalam kegiatan pemerintahan. Berbagai kalangan stakeholder berpendapat bahwa praktek di era otonomi daerah cenderung mengalami peningkatan. Yang menarik adalah GDS 2002 menunjukkan terjadinya pergeseran pusat KKN dari kantor Bupati/Walikota ke DPRD. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, kantor Bupati/Walikota cenderung menjadi pusat praktik KKN di daerah. Namun saat ini DPRD cenderung menjadi pusat KKN yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga eksekutif, seperti kantor Bupati, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan kantor kecamatan maupun kantor desa. Hal ini dapat dipahami karena DPRD sekarang ini menjadi lembaga yang sangat berkuasa sebab memiliki kekuasaan untuk memilih dan memberhentikan Bupati dan Walikota.

Temuan GDS 2002 ke dua adalah bahwa praktik KKN ditengarai lebih banyak di Kota dibandingkan dengan di Kabupaten. Dan temuan yang ke tiga yaitu praktik KKN dalam kegiatan pemerintahan umumnya terjadi dalam rekrutmen pegawai, tender proyek, penyusunan peraturan daerah, dan penyusunan APBD. Alternatif pemecahan masalah praktik KKN di pemerintahan daerah yaitu dapat dilakukan dengan mengutamakan upaya dalam bentuk perbaikan sistem pengawasan, perbaikan etika moral pegawai, dan pemberian peringatan atau sanksi.

Dari berbagai fenomena praktik KKN diatas maka dapat dikatakan bahwa Indonesia belum dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, sebab masih banyak terjadinya praktik KKN, maka dapat dipakai indikator dari rendahnya akuntabilitas pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan salah satu ciri penting dari tata pemerintahan yang baik (good governance).

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Negara dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan bukan lagi pemerintah yang “banyak memerintah” namun pemerintah yang “sedikit memerintah” atau “pemerintah yang baik” (better governance) menurut Osborne dan Gaebler dalam Widodo (2000:18). Dalam rangka penyelenggaraan good governance maka ketiga unsur yang berada dalam ruang governance harus dapat bekerja dengan baik. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut adalah : state (Negara atau Pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat). Unsur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada masa yang akan datang diperlukan kerja sama dari unsur tersebut agar pemerintah benar-benar mampu memerintah.

Telah disebutkan diatas bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah memberikan suatu kemajuan dalam berbagai bidang atau tingkat tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota menjadi lebih besar kepada masyarakat. Maka setiap apa yang dilakukan pemerintah khususnya aparturnya dalam rangka melaksanakan semua tugasnya harus dipertanggungjawabkan baik

mengenai keberhasilannya maupun kegagalannya sebagai wujud dari tanggungjawab aparat pemerintah terhadap apa yang telah dilakukannya. Dengan tanggungjawab saja dirasa belum cukup untuk memajukan efektifitas dan efisiensi setiap tindakan aparat negara dalam memberikan layanan, untuk itu perlu dilakukan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban baik terhadap lembaga maupun terhadap masyarakat.

Dalam rangka menanggapi tuntutan pemerintah khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik harus memperbaiki kinerja birokrasi yang profesional guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan kinerja birokrasi yang lebih profesional dalam melayani masyarakat, maka proses pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari pernyataan diatas kewenangan diberikan kepada daerah selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat mengatur keuangan dan mengatur anggaran belanja pemerintah desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa – Desa di wilayah Kabupaten Gresik bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan yang ada di APB Desa. Hal itu tertuang pada Peraturan Daerah Gresik nomor 12 tahun 2006 tentang Desa yang isinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Mengacu pada peraturan diatas Pemerintah desa memutuskan untuk mengatur mengenai sumber APBDes yang terdiri dari tiga sumber. Yang pertama Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari Retribusi pedagang pasar, retribusi parkir dan aset desa yang disewakan. Yang kedua, Pendapatan

yang berasal dari Pemerintah daerah yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Dan yang ketiga yaitu Pihak ketiga (Investor). Aturan tersebut diatur oleh peraturan Desa nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendapatan Desa. Berikut data yang diperoleh penulis untuk menunjang pernyataan diatas :

Tabel 1.1  
Perencanaan dana APBDes pada tahun 2011

No	Uraian	Jumlah Biaya
1	Hasil Pengelolaan kekayaan desa	306.079.500
2	Hasil swadaya dan partisipasi	39.743.000
3	Bagi hasil retribusi	185.109.100
4	Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada desa	122.890.000
5	Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa	102.840.000
Jumlah Realisasi Pendapatan		756.661.600
Jumlah Pendapatan		788.330.000
Saldo Pendapatan minus		31.668.400

Sumber : Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik tahun 2011.

Dari Tabel diatas diperoleh data bahwa penerimaan kas desa yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan Desa yang di sewakan kepada masyarakat sekitar sebesar Rp. 306.079.500. kekayaan Desa yang dimaksud yaitu penyewaan ganjaran petinggi, penyewaan tanah Desa dan lelang parkir pasar. Untuk swadaya dan partisipasi berasal dari hasil pengelolaan listrik pasar Desa dan pelayanan kepada masyarakat. Pada poin ketiga terdapat dana yang berasal dari retribusi, objek dari retribusi tersebut adalah semua pedagang dari pasar Desa Menganti. Pada poin keempat disebutkan dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Desa yang meliputi alokasi dana Desa tahap satu dan tahap dua di tahun 2011.

Tabel 1.2

Pelaksanaan dana APBDes pada tahun 2011

No	Uraian	Jumlah Biaya
1	Belanja Langsung	366.619.250
2	Belanja Tidak Langsung	330.261.000
3	Belanja Bantuan Keuangan	30.183.000
4	Belanja Tak Terduga	15.941.000
	Jumlah	743.004.250
	Jumlah seluruhnya	788.330.000
	Saldo akhir Bulan 2011 Minus	45.325.750

Sumber: Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik tahun 2011.

Dari Tabel diatas diperoleh data bahwa belanja langsung yang dimaksud adalah belanja langsung yaitu belanja untuk kepentingan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana kerja, program perbaikan sarana umum, program perbaikan lingkungan dan pemukiman, program peningkatan pendidikan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan. Dari realisasi dana tersebut, seorang Kepala Desa sangat berperan untuk mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada masyarakat, BPD dan Bupati. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang pemerintah Desa.

Pada Peraturan Daerah (Perda) Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Desa pada Pasal 7 Ayat 1 (a) menjelaskan bahwa proses akuntabilitas yang dilakukan oleh kepala desa harus tertuju pada tiga sasaran yaitu

masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dan Bupati. Itu dimaksudkan agar proses transparansi bisa bermuara pada adanya akuntabilitas dana pada penerimaan kas Desa dan pendistribusian dana di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Dari observasi sementara yang ada di lapangan, Kepala Desa hanya mengimplementasikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada BPD dan Bupati, tetapi peneliti belum menemukan laporan pertanggungjawaban secara tertulis yang ditempel pada papan pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat. Sedangkan didalam Perda Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Nomor 7 Pasal 2 disebutkan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan Desa kepada masyarakat harus berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya (misalnya radio komunitas). Disinilah fenomena yang menarik untuk diteliti.

Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengalokasian dana kas Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan judul “Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja, (Studi di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)“.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akutabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Bagi Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Memberikan saran-saran atau masukan bagi Desa Menganti Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur sebagai alternatif pertimbangan dalam meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap penyelenggaraan dana APB Desa di wilayah Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik di Propinsi Jawa Timur.

#### b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama .

#### c. Bagi Peneliti

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh untuk dilaksanakan di lapangan.